

Peran Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Meminimalisir Populasi Golput pada Pemilihan Umum

The role of lecturers of Pancasila education courses in minimizing the abstention population in elections

Rishi Suprianto^{*a}, Netari Mulyawati^b, Iriansyah^c, Fitara Rahmania^d, Sri Hartati^b, Safaruddin^b

a Universitas Prabumulih, Indonesia

b Universitas Mahakarya Asia, Indonesia

c Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Indonesia

d Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an Annur Lempuing OKI, Indonesia

* rishisuprianto@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This manuscript is based on research using a qualitative literature observation method with the aim of understanding the phenomenon of the emergence of community groups who do not exercise their right to vote in general elections. The involvement of Pancasila lecturers in minimizing voting rights irregularities in elections is an important topic in this research. Various methods that have been implemented by lecturers in teaching Pancasila courses are carefully examined to see their impact on achieving this research objective. This research concludes that by strengthening Pancasila values, students are encouraged to become active and intelligent voters, thereby reducing the number of lost voting rights in general elections. The role of lecturers in minimizing abstentions is implemented through activities such as: Voter Education, Internalization of Pancasila Values, Building Political Literacy, Encouraging Active Participation as Agents of Change, Overcoming Political Apathy, Holding Discussions and Substantive Education.

Keywords

Voting Rights, General Elections, Pancasila Education

Article History

Received: 2026-02-13

Accepted: 2026-03-11

Copyright © 2026, Suprianto et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.417](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.417)

1. PENDAHULUAN

Fenomena golongan putih (golput) dalam pemilihan umum merupakan persoalan yang terus muncul dalam praktik demokrasi di Indonesia. Berbagai faktor dapat memicu munculnya kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain sikap apatis, kekecewaan terhadap tokoh politik, hambatan teknis dalam pelaksanaan pemilihan umum, serta pandangan ideologis tertentu. Kelompok golput umumnya beranggapan bahwa suara mereka tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan keadaan. Kondisi ini

berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena rendahnya partisipasi masyarakat dapat melemahkan legitimasi wakil rakyat maupun pemimpin yang terpilih (Subanda, 2009).

Tingginya angka golput juga mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Faktor internal antara lain kekecewaan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang mempermudah penyebaran berbagai opini, termasuk informasi yang bersifat negatif atau menyesatkan mengenai politik dan pemilihan umum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sikap sinis dan apatis sehingga masyarakat enggan berpartisipasi dalam pemilihan umum (Alfarisi et al., 2022).

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa merupakan kelompok strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Mahasiswa termasuk dalam kategori pemilih pemula atau pemilih muda yang jumlahnya cukup besar dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran politik mahasiswa agar tidak terjebak dalam sikap apatis maupun golput. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan literasi politik, serta membangun kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Melalui proses pembelajaran yang kritis dan reflektif, dosen dapat mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa partisipasi dalam pemilihan umum merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam meminimalisir populasi golput pada pemilihan umum, khususnya di kalangan mahasiswa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode observasi literatur dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis fenomena golongan putih (golput) dalam pemilihan umum serta mengkaji peran dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam meminimalisir populasi golput melalui penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, konsep, dan interpretasi terhadap berbagai pemikiran yang terdapat dalam karya ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Ridwan et al., 2021).

Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini meliputi: (1) sumber memiliki keterkaitan dengan tema partisipasi politik, golput, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan; (2) sumber berasal dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi, serta karya ilmiah yang relevan; (3) sumber memiliki kejelasan penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik; dan (4) sumber memuat teori, konsep, atau hasil

penelitian yang mendukung analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis literatur, antara lain artikel jurnal, buku teks, laporan pemerintah, karya ilmiah, serta sumber informasi daring yang kredibel (Sulung & Muspawi, 2024).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengumpulan data literatur yang relevan dengan topik penelitian; (2) reduksi data dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian; (3) penyajian data dalam bentuk deskripsi konseptual; dan (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu dengan mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan peran dosen Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Proses analisis dilakukan secara berulang dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti (Fatimah et al., 2025). Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual yang komprehensif mengenai peran dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam meminimalisir populasi golput pada pemilihan umum, khususnya di kalangan mahasiswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendidikan Politik dan Penguatan Kesadaran Demokrasi

Pendidikan pemilih merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai pemilih pemula. Hak suara dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional yang bersifat asasi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pemilihan umum, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk partisipasi langsung untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi pemilih, termasuk munculnya fenomena golput, dapat berdampak pada lemahnya legitimasi politik serta menurunnya kualitas demokrasi dalam suatu negara (Gulo & Mendrofa, 2025).

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa termasuk kelompok strategis yang memiliki potensi besar dalam menentukan tingkat partisipasi politik. Mahasiswa umumnya berada pada kategori pemilih pemula yang masih berada pada tahap awal dalam memahami praktik demokrasi, sehingga membutuhkan pembinaan yang sistematis agar mampu menggunakan hak pilih secara rasional dan bertanggung jawab. Fahrul Muzaqqi (UNAIR, 2024) menyatakan bahwa *“pemilih pemula merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemilihan umum, karena mereka masih berada pada tahap awal untuk mempraktikkan demokrasi, khususnya demokrasi elektoral.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilih pemula memerlukan pendidikan politik yang memadai agar tidak terjebak dalam sikap apatis maupun golput.

Dalam hal ini, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik yang bersifat edukatif, reflektif, dan kritis. Pendidikan pemilih tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang prosedur pemilihan umum, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Melalui proses pembelajaran, dosen dapat menjelaskan makna hak pilih sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa partisipasi dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai kebangsaan.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui penyampaian materi tentang sistem pemilihan umum, bahaya politik uang, pentingnya rekam jejak kandidat, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana literasi politik. Strategi pembelajaran yang memanfaatkan media sosial dan platform digital dinilai efektif dalam menjangkau mahasiswa sebagai generasi muda yang akrab dengan teknologi. Selain itu, pembelajaran juga perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun propaganda politik yang dapat menimbulkan sikap apatis terhadap pemilihan umum (Pardana, 2023).

Peran dosen dalam pendidikan pemilih tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa penggunaan hak suara memiliki dampak langsung terhadap masa depan bangsa. Mahasiswa yang memiliki pemahaman politik yang baik cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan golput. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam meminimalisir populasi golput, karena pembelajaran tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara.

3.2. Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Partisipasi Politik

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di perguruan tinggi merupakan salah satu pendekatan penting dalam membangun kesadaran politik mahasiswa agar tidak terjebak dalam sikap apatis maupun golput. Mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi teoritis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kebangsaan yang menekankan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi. Melalui pembelajaran yang sistematis, dosen diharapkan mampu menanamkan pemahaman bahwa partisipasi dalam pemilihan umum merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menegaskan prinsip kerakyatan dan kedaulatan rakyat (Wibowo et al., 2022).

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran kritis terhadap persoalan kebangsaan, termasuk pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rutin lima tahunan, tetapi sebagai sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketika mahasiswa memahami bahwa hak suara merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional, maka kecenderungan untuk bersikap golput dapat diminimalisir.

Ali Taher Parasong (UMJ, 2025) menyatakan bahwa *“secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara (philosofische grondslag) yang digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila memuat prinsip kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan sebagai landasan kehidupan bernegara.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan langsung dengan praktik demokrasi, sehingga partisipasi dalam pemilihan umum merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, sikap golput dapat dipandang sebagai bentuk lemahnya internalisasi nilai kebangsaan dalam diri warga negara.

Peran dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila menjadi sangat penting dalam proses internalisasi nilai tersebut. Dosen tidak hanya menyampaikan konsep teoritis, tetapi juga membimbing mahasiswa untuk memahami hubungan antara nilai Pancasila dan praktik demokrasi dalam kehidupan nyata. Melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi kritis, mahasiswa dapat diarahkan untuk melihat bahwa kualitas pemilihan umum sangat menentukan kualitas penyelenggaraan negara. Pemahaman ini mendorong mahasiswa untuk menyadari bahwa penggunaan hak pilih merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai warga negara.

Pancasila, khususnya sila keempat, mengandung makna bahwa penyelenggaraan negara harus selaras dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, partisipasi dalam pemilihan umum menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran politik masyarakat. Rikardo (2020) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat diwujudkan apabila warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum. Jika partisipasi rendah, maka kualitas demokrasi juga akan menurun karena keputusan politik tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam konteks inilah dosen Pendidikan Pancasila memiliki peran sebagai agen pembentuk kesadaran politik mahasiswa. Melalui pembelajaran yang menekankan nilai tanggung jawab, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, dosen dapat mendorong mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap pemilihan umum. Mahasiswa yang memiliki pemahaman ideologis dan kesadaran kebangsaan yang kuat cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilih dan bahkan mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk ikut berpartisipasi. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meminimalisir populasi golput, khususnya di kalangan pemilih muda.

3.3. Peran Dosen sebagai Agen Perubahan dalam Meminimalisir Golput

Selain melalui pendidikan pemilih dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, peran dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila juga dapat dilihat sebagai agen perubahan dalam membangun literasi politik mahasiswa dan meminimalisir sikap apatis terhadap pemilihan umum. Literasi politik menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat, karena rendahnya pemahaman politik seringkali menyebabkan munculnya sikap sinis, tidak percaya, dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak suara. Penyebaran informasi yang tidak akurat, hoax, dan propaganda politik yang berlebihan dapat memperkuat sikap apatis, terutama di kalangan generasi muda yang banyak memperoleh informasi dari media digital (Sardjito, 2024).

Mahasiswa sebagai kelompok terdidik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi politik. Oleh karena itu, dosen Pendidikan Pancasila tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dalam membangun budaya literasi politik yang sehat. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk memahami sistem politik, menilai rekam jejak kandidat, serta membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Literasi politik yang baik akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara rasional dalam pemilihan umum dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap demokrasi (Evelina & Angeline, 2015).

Peran dosen juga penting dalam menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi politik merupakan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Penggunaan hak suara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan masa depan bangsa dan kualitas pemerintahan yang akan terbentuk. Amatahir (2023) menyatakan bahwa penggunaan hak pilih merupakan bentuk tanggung jawab moral warga negara dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan oleh pemimpin yang memiliki integritas. Oleh karena itu, mahasiswa perlu didorong untuk memahami bahwa golput bukanlah solusi terhadap kekecewaan politik, melainkan dapat memperlemah kualitas demokrasi.

Dalam proses pembelajaran, dosen juga dapat mendorong mahasiswa untuk berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat. Mahasiswa memiliki posisi strategis karena memiliki kapasitas intelektual, semangat kritis, dan idealisme yang kuat. Hati dan Wardi (2024) menjelaskan bahwa mahasiswa dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat dengan cara mengedukasi lingkungan sekitarnya, menyebarkan informasi yang benar, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran politik di masyarakat.

Sikap apatis terhadap pemilihan umum sering muncul karena rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi. Handayani dan Fahmi (2019) menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dapat berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintahan dan menurunnya kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi muda. Dalam hal ini, dosen Pendidikan Pancasila memiliki peran sebagai penghubung antara dunia akademik dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab warga negara (Alfarisi et al., 2022).

Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah melalui diskusi dan edukasi substantif yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Diskusi yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan analisis, argumentasi, dan pemecahan masalah secara rasional. Maisarah et al. (2025) menyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik seringkali berkaitan dengan rendahnya literasi dan kurangnya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan secara mendalam. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis diskusi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran politik mahasiswa.

Harianto (2020) menegaskan bahwa metode diskusi dalam pembelajaran dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang efektif. Melalui diskusi yang bersifat substantif, mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar menganalisis dan mengevaluasi berbagai fenomena sosial, termasuk fenomena golput. Selain itu, edukasi yang bersifat substantif juga diperlukan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Edukasi yang sistematis dan berkelanjutan dapat membentuk sikap aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi (Rahman et al., 2024).

Dengan demikian, peran dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangun literasi politik, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi aktif

mahasiswa dalam pemilihan umum. Melalui pendidikan yang kritis, dialogis, dan reflektif, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, sehingga populasi golput dapat diminimalisir dan kualitas demokrasi dapat terus ditingkatkan.

4. KESIMPULAN

Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam meminimalisir populasi golput, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai pemilih pemula. Peran tersebut tidak hanya melalui penyampaian materi perkuliahan, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, penguatan literasi politik, serta pembentukan kesadaran demokrasi yang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan pemahaman bahwa penggunaan hak pilih merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus pengamalan nilai-nilai kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik, termasuk fenomena golput, seringkali dipengaruhi oleh sikap apatis, rendahnya literasi politik, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, peran dosen tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan agen perubahan yang mampu membangun kesadaran kritis mahasiswa melalui pembelajaran dialogis, diskusi substantif, dan edukasi politik yang kontekstual. Sejalan dengan itu, penguatan peran dosen Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas partisipasi politik generasi muda. Melalui pembelajaran yang menekankan nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan literasi politik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab, sehingga angka golput dapat diminimalisir dan kualitas demokrasi dapat terus ditingkatkan.

BIOGRAFI PENULIS

Rishi Suprianto adalah akademisi di Universitas Prabumulih, yang mengkhususkan diri dalam bidang humaniora dan sains sosial. Menyelesaikan strata satu dan strata dua bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Menyandang gelar Doktor di bidang studi ilmu hukum dari Universitas Borobudur.

Email: rishisuprianto@gmail.com

Netari Mulyawati berprofesi sebagai akademisi di Universitas Mahakarya Asia dalam bidang humaniora dan sains sosial yang menyelesaikan pendidikan strata satunya di Universitas Pendidikan Indonesia dalam bidang sastra dan menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Padjajaran dalam bidang Humaniora.

Email: mulya.netari@gmail.com

Iriansyah berprofesi sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja dalam bidang humaniora dan sains sosial yang menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Bengkulu dalam bidang ilmu hukum dan strata satu di Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja dalam bidang pendidikan agama Islam, terakhir menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Sjakhyakirti dalam bidang ilmu sains.

Email: yankarim7@gmail.com

Fitara Rahmania berprofesi sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an Annur Lempuing Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dalam bidang ilmu Qur'an, menyelesaikan pendidikan strata satu dan strata dua di Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan menyanggah gelar akademik Magister Pendidikan Bahasa Arab.

Email: fitarahmania@gmail.com

Sri Hartati adalah akademisi di Universitas Mahakarya Asia, yang mengkhususkan diri dalam bidang Informatika. Menyanggah gelar Magister di bidang studi Komputer dari Universitas Bina Darma. Saat ini, saat ini menjabat sebagai ketua program studi manajemen informatika (Kampus Kab Ogan Komering Ulu) Universitas Mahakarya Asia.

Email: hartatiakmi1984@gmail.com

Safaruddin adalah akademisi di Universitas Mahakarya Asia, yang mengkhususkan diri dalam bidang humaniora dan sains sosial. Menyanggah gelar Doktor di bidang studi Peradaban Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Saat ini, aktif sebagai anggota Perkumpulan karir dosen Indonesia (PERKADOSI) dan Forum silaturahmi doktor Indonesia (FORSILADI).

Email: safaruddintohir@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, H., Aisyah, V. N., & Kom, M. I. (2022). *Konstruksi makna golput di kalangan mahasiswa* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Amatahir, Z. (2023). Peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilihan umum. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98.
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). Upaya mengatasi golput pada pemilihan umum 2014. *Humaniora*, 6(1), 97–105.
- Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitriasia, A. (2025). Literature review dan metodologi ilmu pengetahuan khusus. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 41–48.
- Gulo, L. P. I., & Mendrofa, E. A. Y. (2025). Hak untuk bersuara, kewajiban untuk berpartisipasi: Makna demokrasi sesungguhnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 120–126.
- Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2019). Problematika pemungutan suara ulang pemilu serentak tahun 2019. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.

- Hariato, E. (2020). Metode bertukar gagasan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 9(4), 411–422.
- Hati, S. T., & Wardi, S. (2024). Edukasi pemilih milenial pada ajang pemilihan umum dalam membentuk perubahan tatanan sosial masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- Pardana, D. (2023). Pengaruh media sosial dalam memprediksi partisipasi perilaku pemilih pemula pada pemilihan umum 2024. *AT-Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 36–44.
- Rahman, N. A., Sirait, N. M. G., Rahmadana, R. A., Kayla, S. A., Fiddien, M. A., Krismianto, M. G. G. L., & Tarina, D. Y. (2024). Membangun generasi muda yang demokratis dan kritis dengan adanya demokrasi substantif. *Media Hukum Indonesia*, 2(4).
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Rikardo, O. (2020). Penerapan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(2), 175–186.
- Subanda, N. (2009). Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilihan umum. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60–72.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.